

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

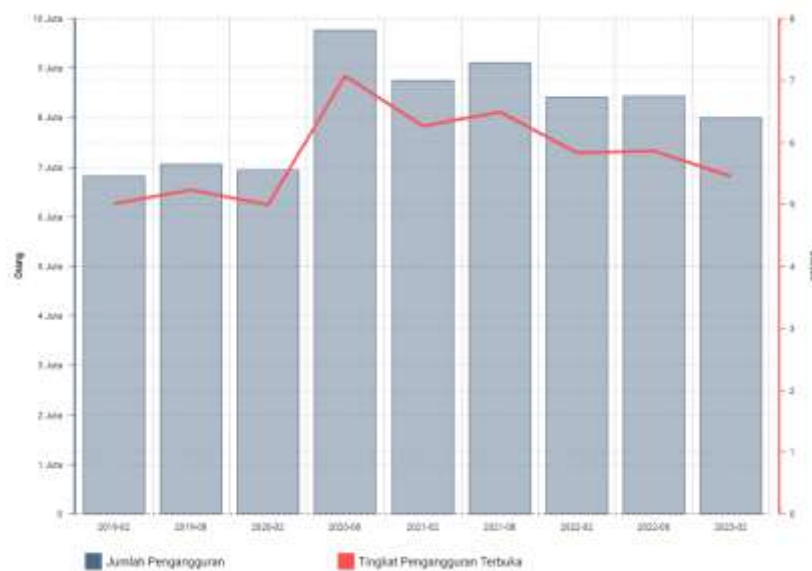
Suatu negara akan semaksimal mungkin dalam mensejahterakan rakyatnya dengan mengupayakan pemenuhan kepentingan nasional. Agar kepentingan nasional sebuah negara dapat terpenuhi, tentunya akan dilakukan berbagai cara, salah satunya dengan bantuan negara lain. Sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri dengan hanya mengandalkan sumber daya yang dimilikinya tanpa mendapat bantuan dari negara lain. Salah satu kerjasama yang dinilai efektif dan saling menguntungkan adalah kerjasama bilateral. Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara.

Salah satu negara yang telah lama menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia adalah Jepang. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang telah berlangsung selama 65 tahun yang dimulai pada 20 Januari 1958. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut salah satunya adalah dalam bidang ketenagakerjaan. Pada bidang ketenagakerjaan, kedua negara memiliki mekanisme pengiriman PMI melalui *Specified Skilled Workers (SSW)* maupun perawat melalui skema IJEPA (*Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement*). Selain itu, terdapat program pemagangan *Technical Intern Training Program (TITP)* yang saat ini mencapai 25 ribu orang peserta ([www.kemenlu.go.id](http://www.kemenlu.go.id), 2023).

Kerjasama Indonesia dan Jepang di bidang ketenagakerjaan terus menguat ditandai dengan upaya pengembangan tenaga terampil yang dikelola oleh *International Man Power Development Organization Japan* yang kemudian disebut *IM Japan*. *IM Japan* adalah asosiasi pengusaha kecil dan menengah yang menerima pemegang dari luar Jepang, khususnya Indonesia. Program tersebut dimulai setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* pada tanggal 16 September 1994 oleh *IM Japan* dan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dan diperbaharui melalui amandemen terhadap MoU tersebut pada tanggal 1 Februari 2010.

Seperti yang diketahui, per 1 Januari 2023 Jepang menjadi salah satu negara dengan penurunan jumlah populasi tertinggi. Hal tersebut membuat negara Jepang mengeluarkan kebijakan dalam membuka peluang bagi tenaga kerja dari luar negaranya untuk bisa bekerja di negaranya. Permasalahan tersebut bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk mencapai 273,52 juta jiwa yang berdampak pada ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat di Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum bisa mendapatkan pekerjaan di usia bekerjanya.

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang tidak luput dari masalah pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Februari 2023 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang, berkurang sekitar 410 ribu orang dibanding Februari 2022.



Gambar 1. 1 Grafik Tingkat Pengangguran di Indonesia  
(Adi Ahdiat, 2023)

Dalam mengatasi masalah tersebut, tentunya Indonesia membutuhkan bantuan dari negara lain. Adanya kerja sama antar negara Indonesia dan Jepang dalam sektor ketenagakerjaan akan menjadi peluang dan juga upaya bagi Indonesia dalam mengembangkan SDM dan mengurangi angka pengangguran. Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor KEP-104A/MEN/2002 menyatakan bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar

negeri merupakan program nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan sumber daya manusia. Dengan adanya penempatan tenaga kerja Indonesia ke Jepang diharapkan sumber daya manusia Indonesia dapat berkembang, mendapatkan kesejahteraan, dan meningkatkan taraf hidupnya.

Saat ini, Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Depnakertrans) Indonesia bekerja sama dengan IM *Japan* dalam merekrut tenaga kerja Indonesia dengan membentuk program pemagangan ke Jepang. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri dijelaskan bahwa pemagangan di luar negeri merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan pekerja yang berpengalaman, dalam proses produksi barang dan jasa, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat diketahui bahwa program pemagangan di Jepang memiliki tujuan agar masyarakat Indonesia menguasai keterampilan tertentu yang didapatkan ketika bekerja dan belajar disana.

Program pemagangan ke Jepang dapat diselenggarakan melalui 2 jalur, yaitu melalui IM *Japan* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja, dan juga melalui Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). Pada program pemagangan yang diselenggarakan oleh pemerintah, peserta akan mendapatkan subsidi dan mendapat modal usaha serta dana pencairan asuransi. Namun, seleksi jalur ini cukup ketat, sehingga para calon peserta harus bersaing. Sedangkan program pemagangan melalui LPKS, peserta harus menggunakan biaya mandiri mulai dari pelatihan awal sampai pemberangkatan. Namun jalur pemagangan swasta lebih banyak diminati karena prosesnya lebih cepat.

Untuk mengikuti program pemagangan luar negeri khususnya Jepang, diperlukan persiapan yang sangat matang karena bahasa dan kebudayaan di sana

akan sangat berbeda dengan di Indonesia. Sehingga peserta pemagangan perlu mendapatkan pembekalan dan persiapan dalam penguasaan keterampilan menggunakan bahasa Jepang serta pengetahuan tentang kebudayaan di Jepang. Dengan adanya pembekalan dan persiapan, diharapkan para peserta pemagangan dapat beradaptasi dengan baik ketika berada di Jepang. Adapun yang menjadi tempat bagi para calon peserta pemagangan untuk mematangkan persiapan magang adalah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). LPK memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai pembimbing peserta program pemagangan Jepang dan memberikan pembekalan untuk mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan oleh peserta pemagangan, seperti bahasa Jepang dan kebudayaannya. Selain itu, LPK juga berperan dalam mengadakan serangkaian pelatihan baik keterampilan, pengetahuan, fisik, maupun mental agar peserta pemagangan Jepang menjadi pribadi yang memiliki etos kerja yang tinggi seperti yang dibutuhkan oleh dunia industri di Jepang.

Program pemagangan Jepang mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Tercatat Indonesia menjadi peringkat ketiga dengan peserta magang di Jepang terbanyak per akhir Desember 2021 berjumlah 3.889 orang peserta (7,8%) (Suki.org, 2022). Selain sebagai sarana untuk pengembangan keterampilan kerja, pemagangan Jepang juga menjadi peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dari pada di Indonesia. Dikutip dari Era.id (2023), gaji atau pendapatan magang di Jepang berkisar 80.000 hingga 120.000 yen per bulan, atau dalam rupiah (kurs Rp 115) sekitar Rp 9.000.000 hingga Rp 14.000.000 per bulan. Selain itu, peserta magang Jepang juga berhak atas tunjangan dan upah lembur yang jika dijumlahkan dengan gaji pokok, upah lembur, dan tunjangan bisa mencapai 180.000 hingga 200.000yen atau dalam rupiah total pendapatan kotor dikisaran Rp 21.000.000 hingga Rp 24.000.000 per bulan.

Dengan jumlah pendapatan yang besar, tentunya sangat sesuai dengan biaya hidup yang cukup banyak dikeluarkan ketika selama berada di Jepang dan juga terbilang cukup mahal apabila dalam rupiah. Sehingga para calon peserta pemagangan perlu dibekali dengan edukasi literasi keuangan mengenai pengelolaan keuangan pribadi agar dapat menyeimbangkan antara kebutuhan hidup dengan

pendapatannya selama berada di Jepang. Adapun Literasi keuangan merupakan kemampuan individu untuk memahami, mengelola, dan mengambil keputusan yang tepat terkait dengan keuangan. Literasi keuangan menjadi hal penting yang perlu dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari karena setiap individu memerlukan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Individu perlu memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip keuangan yang baik. Dengan memiliki literasi keuangan yang baik, individu dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak dan mengelola keuangan secara efektif dan efisien, serta merencanakan keuangan untuk masa depan dengan baik.

Menurut Marufi (2018) dalam (Saputro & Hastomo, 2020, p. 118) Perencanaan keuangan penting bagi peserta pemagangan Jepang agar ketika mereka kembali ke Indonesia, uang yang didapatkan bisa diolah kembali untuk memenuhi kebutuhan dan harapan, serta mengembangkan jiwa kewirausahaan yang tentunya sebelum menjalankan bisnis harus mampu menyusun laporan keuangan. Selain itu, individu juga memiliki keadaan atau kondisi yang berbeda-beda, seperti dimana seseorang harus memenuhi kewajiban membayar utang, membiayai keluarga dan adik-adiknya untuk sekolah, membeli rumah, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu perlu dilakukan dengan perencanaan yang baik, jika tidak bisa saja uang yang didapat ketika pemagangan akan habis begitu saja. Dan ketika pulang kembali akan menjadi pengangguran. Sedangkan seharusnya program pemagangan ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan tingkat kemiskinan.

Kota Tasikmalaya menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menjadi lokasi berdirinya beberapa Lembaga Pelatihan Kerja yang menyelenggarakan pelatihan untuk pembekalan dan persiapan calon peserta pemagangan Jepang. Lembaga-lembaga pelatihan kerja tersebut mendapatkan dukungan dari Dinas Tenaga Kerja setempat karena melalui program pemagangan luar negeri ini dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi warga Kota Tasikmalaya khususnya untuk warga dengan usia produktif serta sebagai upaya dalam mengurangi jumlah angka pengangguran di Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2022 pemerintah Kota Tasikmalaya melepas 24

orang pemuda yang berasal dari Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk melaksanakan magang kerja di Jepang (wartatasik.com, 2022).

Berdasarkan penelusuran peneliti di lembaga pelatihan Bahasa Jepang di Kota Tasikmalaya, ditemukan bahwa berdasarkan penuturan alumni peserta pemagangan ke Jepang, sebagian besar peserta pemagangan sudah memiliki kesadaran akan pengelolaan keuangan yang baik karena mereka sudah memiliki target pencapaian keuangan dari hasil magang selama di Jepang. Namun, masih terdapat sebagian kecil dari mereka yang belum memiliki kesadaran dalam pengelolaan keuangan, sehingga mereka tidak memiliki target pencapaian keuangan dari hasil selama magang di Jepang. Selain itu, di salah satu lembaga pelatihan Bahasa Jepang di Kota Tasikmalaya, ditemukan bahwa sebagian peserta pemagangan Jepang belum menguasai keterampilan dalam pengelolaan keuangan, sehingga mereka belum maksimal dalam menyeimbangkan antara kebutuhan hidup selama berada di Jepang dengan upah/ gaji yang didapatkan. Oleh karena itu, Lembaga Pelatihan Kerja sebagai lembaga yang berperan dalam memberikan pendidikan dan pembekalan kepada calon peserta pemagangan perlu membekali para calon peserta pemagangan Jepang dengan memberikan motivasi kesadaran dan pemahaman mengenai manajemen keuangan pribadi, agar mereka dapat mengatur dan mengelola keuangan pribadinya serta menyelesaikan permasalahan finansial yang mungkin terjadi selama berada di Jepang.

Dengan adanya permasalahan yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai tingkat pemahaman literasi keuangan pada calon peserta pemagangan Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja dengan judul: **“Tingkat Pemahaman Literasi Keuangan Calon Peserta Pemagangan Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja (Studi Pada Lembaga Pelatihan Bahasa Jepang di Kota Tasikmalaya)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Penulis mengklasifikasikan masalah-masalah yang teridentifikasi. Adapun sebagian masalah-masalah yang teridentifikasi dalam penelitian yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

- 1) Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki angka pengangguran yang tinggi. Termasuk di Kota Tasikmalaya pengangguran masih menjadi permasalahan yang harus diatasi.
- 2) Terdapat perbedaan bahasa dan kebudayaan antara di Indonesia dan di Jepang.
- 3) Sebagian calon peserta pemagangan Jepang di LPK Bahasa Jepang di Kota Tasikmalaya belum menguasai keterampilan dalam mengelola keuangan pribadi dengan baik.
- 4) Terdapat sebagian calon peserta pemagangan Jepang di LPK Bahasa Jepang di Kota Tasikmalaya yang tidak memiliki target pencapaian dalam hal keuangan, sehingga mereka belum maksimal dalam menyeimbangkan antara kebutuhan hidup dengan upah/ gaji yang didapatkannya.
- 5) Pembekalan mengenai manajemen keuangan pribadi belum dilaksanakan secara intens oleh pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bahasa Jepang yang ada di Kota Tasikmalaya.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan hasil pra survei yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat pemahaman literasi keuangan calon peserta pemagangan Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bahasa Jepang di Kota Tasikmalaya?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pemahaman literasi keuangan calon peserta pemagangan Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bahasa Jepang di Kota Tasikmalaya.

### **1.5 Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini berdasarkan teoritis dan praktis adalah sebagai berikut.

- 1) Secara teoritis, untuk memperluas literatur pengetahuan melalui karya ilmiah, dan menjadi bahan referensi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

2) Secara praktis, untuk pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pemahaman literasi keuangan pada calon peserta pemagangan Jepang, dan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan pemberian edukasi mengenai literasi keuangan kepada para calon peserta pemagangan Jepang. Adapun untuk para calon peserta pemagangan Jepang di LPK Bahasa Jepang, penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran tingkat pemahaman literasi keuangan pribadi, dan dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan mengenai literasi keuangan pribadi.

### **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah penjelasan dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional berisi penjelasan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Berikut merupakan uraian definisi-definisi operasional variabel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

#### **1) Literasi Keuangan**

Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan pribadi dengan baik, termasuk mengerti dan memahami konsep dasar keuangan seperti pengelolaan penghasilan, pengambilan keputusan investasi, pembayaran hutang, pengelolaan anggaran, dan pemahaman tentang produk keuangan seperti kartu kredit dan asuransi. Hal ini memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan keuangan yang bijak dan efektif untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang.

Literasi keuangan diperlukan oleh setiap individu untuk kehidupan sehari-hari yang tidak terlepas dari kebutuhan yang memerlukan keuangan. Begitupun dengan para peserta pemagangan Jepang yang akan menjalani kehidupan di luar negeri, perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola keuangan dengan bijak. Literasi keuangan perlu dipahami oleh calon dan peserta pemagangan Jepang untuk menciptakan kesadaran dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan.



Sehingga dapat meminimalisir pengeluaran yang berlebihan dan dapat mendorong kebiasaan dalam menabung.

## 2) Program Pemagangan Jepang

Pemagangan Jepang merupakan program yang bertujuan untuk membantu meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja para peserta, serta memfasilitasi pertukaran budaya antara Jepang dan Indonesia. Selama program pemagangan, peserta akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan di Jepang untuk belajar tentang teknologi dan praktik-praktik kerja yang canggih dan modern. Biasanya, program ini berlangsung selama satu hingga tiga tahun, tergantung pada jenis pekerjaannya. Selama masa pelatihan, peserta akan menerima pendapatan dan tunjangan bulanan dari perusahaan, serta diatur oleh peraturan kerja yang ketat.

Terdapat dua jalur penyelenggara program pemagangan Jepang di Indonesia, yaitu melalui jalur program IM *Japan*, dan melalui jalur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang sudah memiliki izin *Sending Organizing* (SO). Yang membedakan dari kedua jalur tersebut adalah biaya pra pemberangkatan dan subsidi setelah kepulangan yang diberikan kepada peserta. Jika melalui jalur program pemerintah peserta akan dibiayai oleh pemerintah dan mendapatkan subsidi setelah kepulangan, sedangkan apabila melalui jalur program yang ada di LPKS maka peserta harus mengeluarkan biaya secara mandiri dan tidak akan mendapatkan modal usaha serta asuransi saat kepulangan.

## 3) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Lembaga Pelatihan merupakan salah satu satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pelatihan dan diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan keterampilan atau keahlian, pengetahuan, dan kecakapan hidup tertentu.

Lembaga Pelatihan Kerja juga berperan sebagai penyelenggara program pemagangan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada program pemagangan luar negeri khususnya ke Jepang, Lembaga Pelatihan Kerja berperan sebagai lembaga pendidikan yang memberikan pelatihan dan pengajaran bahasa Jepang, serta mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk pemberangkatan peserta pemagangan baik itu mempersiapkan kebutuhan dokumen-dokumen, maupun

mempersiapkan kebutuhan peserta pemagangan agar siap secara mental, fisik, pengetahuan dan juga keterampilan.

Di Lembaga Pelatihan Kerja, sesekali pihak lembaga akan mendatangkan narasumber di bidang perbankan untuk memberikan edukasi mengenai manajemen keuangan. Selain itu, motivasi mengenai keuangan juga sesekali disampaikan oleh alumni program pemagangan. Akan tetapi, kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara intens. Sehingga edukasi mengenai pemahaman literasi keuangan jarang diberikan.